

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada awal reformasi, dibentuk kebijakan daerah otonom sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yakni memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan dalam] mengurus daerahnya sendiri.

Tuntutan ini juga dipicu di tengah terjadinya krisis ekonomi yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi beberapa kebijakan, seperti desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas serta mengatasi ketertiban desentralisasi Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan untuk merencanakan dan mengawasi urusan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengembangkan dan meningkatkan aliran pendapatan mereka untuk kemajuan masyarakat dan kemajuan daerah mereka jika mereka memiliki otonomi daerah (Saragih & Siregar, 2020).

Kinerja pengelolaan keuangan indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem otonomi (Tumija & Sinta, 2022). Hal ini disebabkan karena salah satu indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah

daerah serta tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan pertanggungjawaban publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan (Subianto & Irawan, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah dievaluasi untuk mengetahui efektif atau tidaknya penanganan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Baik dan bersihnya pengelolaan pemerintah dapat diwujudkan jika prinsip transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan partisipatif dapat dipenuhi (Purnamawati & Adnyani, 2019). Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tersebut di pemerintahan, maka laporan keuangan adalah salah satu media yang dipercaya dapat membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan optimal. Analisa rasio keuangan terhadap laporan keuangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber dari angka-angka yang akan digunakan sebagai perhitungan. Serta hasil dari analisa rasio keuangan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan lebih lanjut terkait evaluasi pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah. Terdapat beberapa jenis analisa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja di pemerintahan daerah. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio derajat desentralisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja di BPKPD Kabupaten Buleleng.

Menurut Saragih & Siregar (2020) pada penelitiannya dikatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing masih tergolong rendah yang dapat ditunjukkan dari hasil Tingkat spesifiknya masih sangat rendah, kecepatan kerja baik, kecepatan kerja lemah, tingkat kompatibilitas lemah, dan pertumbuhan rendah. Kemudian Suarnama (2022) pada penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ditunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori kurang, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali, rasio efektivitas kurang efektif, rasio efisiensi kurang efisien, dan rasio keserasian untuk belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal. Selain itu, Wulandari et al. (2023) juga menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram sudah mulai sedikit mandiri dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahannya, Dampak PAD terhadap pendapatan daerah tidak signifikan bila dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio efektifitas sudah terbilang efektif, rasio efisiensi masih berfluktuasi, rasio keserasian memiliki hasil bahwa belanja operasi lebih besar daripada belanja modal, rasio pertumbuhan kurang baik, dan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Mataram terbilang sudah mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa analisa rasio keuangan memiliki peran yang penting sebagai salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja

bervariasi tergantung situasi, kondisi, dan permasalahan yang dialami yang terpenting dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, untuk melakukan analisa rasio diperlukan pemahaman serta literasi yang cukup agar dapat memahami perkembangan tingkat rasio dalam suatu periode.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng merupakan salah satu instansi yang selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya setiap periode. Pengukuran kinerja keuangan melibatkan perbandingan tingkat pencapaian terhadap kriteria yang telah ditentukan, untuk menentukan sejauh mana keuangan dengan realisasi pelaksanaannya (Pemkab Buleleng, 2020). Berdasarkan hasil reviu rencana strategis BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan rencana strategis BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, ditemukan fenomena bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKPD Kabupaten Buleleng masih di bawah rata-rata, dan kemampuan pengelolaan keuangannya masih jauh dari ideal. Pendapatan daerah dihimpun melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dilakukan untuk memupuk kemandirian daerah yang merupakan perwujudan asas desentralisasi (Pradana, 2023). Sedangkan pengelolaan keuangan yang belum optimal dapat dikaitkan terhadap kinerja keuangan yang belum berjalan dengan maksimal. Sehingga untuk menindaklanjuti fenomena tersebut di tahun berikutnya, penulis melakukan pengumpulan informasi guna mengetahui perkembangan jumlah PAD dalam beberapa periode melalui

analisa rasio yang dilakukan. Berikut merupakan tingkat PAD di BPKPD Kabupaten Buleleng dari tahun 2017-2022.

Tabel 1. 1  
Tingkat PAD BPKPD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	192.641.004.371,55	166.885.412.229,12
2018	181.822.563.052,00	157.770.286.444,33
2019	206.831.559.676,00	184.703.324.230,58
2020	156.529.131.050,71	144.469.495.716,49
2021	182.930.921.627,50	167.352.095.771,65
2022	218.860.370.727,00	194.766.532.926,65

Tabel di atas menunjukkan kuantitas PAD mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, menurun pada tahun 2019 dari tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat PAD yang cukup drastis disebabkan karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan kegiatan pemerintah daerah menjadi kurang optimal karena bekerja dan melakukan aktivitas lainnya dari rumah serta seluruh daerah di Indonesia pada saat itu melakukan *lockdown* sehingga pelaksanaan program-program seperti pelayanan utamanya menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Namun di tahun berikutnya tingkat PAD sudah mengalami peningkatan dikarenakan kondisi pandemi yang sudah membaik walau masih terdapat pembatasan-pembatasan dalam berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi, hal ini masih menjadi perhatian khusus dari BPKPD karena walaupun mengalami peningkatan, tingkat PAD masih tergolong rendah. Serta pada rencana strategis tahun 2023-2026, BPKPD Kabupaten Buleleng kembali mengungkap permasalahan tersebut sebagai salah satu fokus permasalahan yang akan

diatasi sehingga hal ini menjadikan BPKPD memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan PAD lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan situasi yang kini dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Buleleng, apabila berlangsung terus menerus akan menjadi bentuk kekhawatiran dari pemerintah dan masyarakat karena akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, melalui fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng.**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang merupakan perpanjangan tangan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dilansir dari Renstra BPKPD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dan Renstra tahun 2023-2026, permasalahan pokok yang sedang dialami yakni masih rendahnya PAD dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Akan tetapi hal ini kini sudah menjadi fokus permasalahan yang akan berusaha untuk dituntaskan melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dengan harapan dapat mempengaruhi pertumbuhan PAD dan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih optimal.

Meningkatnya PAD dari tahun ke tahun akan menunjukkan bagaimana upaya dan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kemandirian keuangan

pada daerahnya dengan tidak terus atau terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan terciptanya kemandirian keuangan dan pertumbuhan PAD ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah khususnya lembaga keuangan pemerintah daerah sudah mampu dalam rangka mengelola keuangan daerahnya dengan memaksimalkan setiap potensi-potensi yang ada guna memberikan manfaat serta kesejahteraan dan kepuasan bagi daerahnya sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan alat yang secara khusus dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam periode tertentu agar masyarakat dan pemerintah pusat dapat mengetahui apakah pengelolaan keuangan sudah berjalan optimal atau belum. Maka dari itu, analisa rasio adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber utama melakukan perhitungan. Terdapat jenis-jenis rasio yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan, namun tentunya dengan tetap memperhatikan situasi kondisi, serta ketersediaan informasi. Nantinya hasil dari analisa rasio ini lah yang dapat mendeskripsikan atau menggambarkan situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang diperoleh yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat daerah Kabupaten Buleleng.

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka penting bagi BPKPD memiliki alat pengukuran kinerja keuangan yang tepat yang mampu memberikan informasi keuangan yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam rangka sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari

itu, perlu diketahui bagaimana analisa rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng selama tahun 2017-2023.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Membatasi masalah sangat penting untuk lebih memfokuskan tujuan penelitian dan mencegah miskonsepsi terkait penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan dan dengan mengangkat judul artikel. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengujian rasio keuangan daerah, seperti rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, keserasian, dan derajat desentralisasi, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BPKPD Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis rasio keuangan daerah dalam rangka mengukur kinerja keuangan pada BPKPD Kabupaten Buleleng berdasarkan konteks dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menganalisis rasio-rasio pendapatan daerah untuk mengukur kinerja keuangan BPKPD Kabupaten Buleleng merupakan tujuan dari penelitian ini.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun manfaat yang diperoleh yakni :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini harus dimanfaatkan untuk memperjelas akuntansi sektor publik, khususnya pemanfaatan analisis rasio keuangan daerah untuk mengevaluasi kinerja. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan temuan penelitiannya.

## 2. Praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka manfaat yang diperoleh yaitu penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisa rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga membantu penulis dalam mengasah kemampuan menganalisa serta menyelesaikan suatu *project*. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Melalui penelitian ini maka pihak kampus yakin sudah menghasilkan mahasiswa yang unggul dan tangguh karena mahasiswa sudah mampu menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

### c. Bagi BPKPD Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman standar bagi BPKPD Kabupaten Buleleng dalam melakukan evaluasi

kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan BPKPD Kabupaten Buleleng tetap mempertahankan posisinya sebagai badan keuangan yang mengelola pendapatan daerah yang menjaga integritas, menerima kritik, dan juga saran untuk dipertimbangkan guna pengembangan kualitas dan pelayanan. Temuan dari penelitian ini diperlukan bisa memberikan bantuan bagi pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk masalah keuangan yang terjadi dan dapat memberikan informasi tentang keadaan pemerintah daerah yang sesungguhnya dengan lebih rinci dengan melihat tingkat rasio keuangan daerah dalam beberapa periode.

d. Pembaca dan Pihak Pihak yang Memerlukan

Penelitian ini dapat menggambarkan dan tentunya dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Lebih lagi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pada penelitian mendatang.